

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman sekarang siapa yang tidak tahu dengan yang namanya politik, hampir seluruh orang berpolitik, dari orang biasa sampai raja-raja pun melakukan politik. Dalam kehidupan kita sehari-hari istilah “politik” sudah tidak begitu asing karena segala sesuatu yang dilakukan atas dasar kepentingan kelompok, pribadi atau kekuasaan sering kali di atas namakan dengan label politik.¹

Dalam Islam pun tentunya tak lepas dari namanya politik. Tak bisa dimungkiri bagi kaum Muslimin dewasa ini, bahwa Islam merupakan jalan hidup yang meliputi aspek-aspek fisik, politik dan spiritual.²

Hal ini dapat juga disebut dengan istilah *Islam politik*, yaitu pencerminan dari ajaran Islam mengenai politik (hubungan manusia dengan kekuasaan yang diilhami oleh petunjuk Allah) yang telah bercampur dengan berbagai kepentingan manusia. Kajian mengenai *Islam politik* lebih merupakan usaha mempelajari perilaku politik

¹Hafied Cangara, *Komunikasi Politik Konsep, Teori dan Strategi*, Cet. 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h 22.

²A. Ezzatti, *Gerakan Islam Sebuah Analisis*, Penerj. Agung Sulistyadi, Cet I, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1990, h.24.

seorang atau umat Islam yang didorong oleh kesadaran keagamaan (Islam).³

Dalam Islam telah ada kesepakatan bahwa sumber utama ajarannya adalah al Quran, yang dari sini diturunkan dua intisari ajaran, yaitu akidah dan syariah. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Tidak ada akidah tanpa syariah dan begitu pula sebaliknya. Akidahlah yang menghubungkan antara hamba dengan Allah. Ia tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat. Sedangkan syariah juga menghubungkan manusia dengan Allah, yang biasa disebut ibadah. Hubungan sesama manusia disebut *muamalah*, sedangkan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah disebut politik.⁴

Politik dilihat secara teoritis merupakan ilmu yang penting dan memiliki kedudukan tersendiri. Sedangkan dilihat dari segi praktis merupakan aktivitas yang mulia dan bermanfaat, karena ia berhubungan dengan pengorganisasian urusan makhluk dalam bentuk yang sebaik-baiknya, Imam Ibnul Qayyim mengutip perkataan Imam Abul Wafa' ibnu 'Aqil al-Hambali bahwa *siyasah* (politik) merupakan tindakan atau perbuatan yang dengannya seseorang lebih dekat kepada

³M. Rusli Kanim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1999, h 2.

⁴*Ibid.*, h. 3.

kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan, selama politik tersebut tidak bertentangan dengan syara'.⁵

Salah satu jenis politik ialah Pemilihan Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi, maupun kota di Indonesia dengan memilih Kepala Daerah, yakni memilih Calon Gubernur maupun calon Walikota, Serta calon Bupati di setiap daerahnya masing-masing. Keadaan ini tentunya didukung dengan hadirnya berbagai macam partai politik, karena untuk memilih calon Legislatif tentunya ada partai di balik hal tersebut. Dalam partai tentunya juga ada tokoh yang sangat disegani, salah satunya ialah ulama, dengan ajakan dan fatwa politik mereka dalam kampanye pemilu, para ulama berhasil meyakinkan para jamaah di pesantren dan komunitas disekitar pesantren-pesantren untuk memberikan suara, meningkatkan perolehan suara dalam konteks pemilu di Indonesia adalah sangat penting dan strategis.⁶

Pengaruh ulama tidak hanya pada masyarakat awam tetapi juga merambah pada para pejabat atau tokoh partai politik. Dalam kenyataan empirik bahwa ulama banyak diperebutkan oleh orang yang menduduki jabatan politisi tertentu. Hingar bingar dan tarik menarik ulama dalam pemilu, pemilihan gubenur, Bupati/ walikota menandakan bahwa tarikan kepentingan politik ulama masih besar.⁷

⁵Yusuf al Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2*, Terj. As'ad Yasin, Cet. IV, Jakarta: Gema Insani, 2008, h. 913.

⁶Faisal Ismail, *NU Gusdurisme dan Politik Kiai*, Cet I, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999, h. 39.

⁷Abdurrahman, "Fenomena Kiai dalam Dinamika Politik", *Jurnal Karsa*, Vol. XV No. 1 April 2009, h. 34.

Ulama-ulama kita terdahulu mengagungkan nilai politik dan keutamaannya sehingga Imam Ghazali mengatakan, “sesungguhnya dunia itu merupakan ladang untuk akhirat, dan tidaklah sempurna agama tanpa dunia.”⁸

Berkenaan dengan Ulama Nabi Saw bersabda:

وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَثُوا الْعِلْمَ
فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطٍّ وَافِرٍ

Artinya: ” Dan Sesungguhnya Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. maka Barangsiapa yang mengambilnya maka ia telah mengambil bagian yang banyak.”⁹ (HR. Abu Daud & Tirmidzi no. 1389)

Dari hadist di atas dapat kita ambil beberapa sikap seorang ulama harus memiliki sikap yang luhur, mewarisi sifat para Nabi. Terutama Rasulullah Saw, sebagai teladan hidup sepanjang zaman. Rasulullah senantiasa menjadi teladan yang baik bagi manusia seluruhnya.¹⁰

Motivasi dan misi yang hendaknya ditanamkan ke dalam diri kaum ulama adalah, kehadiran ulama bukanlah untuk dirinya sendiri, ia juga bertugas melayani kepentingan umat. Ulama adalah *khadimul ummah* (pelayan umat). Nasihat ulama kepada pemimpin, umat dan

⁸Yusuf al Qardhawi, *Fatwa-fatwa...*, h. 913-914.

⁹Imam An-Nawawi, *Kumpulan Hadist dari Riyadhus Shalihin edisi Kantong*, cet 1, Jakarta: Asaduddin Pers, 2008, h. 667.

¹⁰Rafi'udin, dkk, *Prinsip dan Strategi Dakwah*, Cet I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1997, h. 96.

siapa saja adalah bentuk pelayanan ulama yang harus dimengerti semua pihak. Bila ada pendapat, tausiyah, pengajian dan tulisan ulama yang menyatakan kebenaran mestinya dihargai. Karena, nasihat ulama jelas didasarkan pada nilai-nilai dasar agama Allah yang pasti benarnya. Kalau demikian, tidak ada alasan meremehkan atau tidak mempedulikan nasihat ulama.¹¹ Tentunya masyarakat pun akan menilai bahwa keterlibatan ulama dalam dunia politik sedikit atau tidaknya mempengaruhi kharisma dari ulama itu sendiri.

Terlebih dalam kurun dasawarsa terakhir ini, sosok ulama sedang dan telah menjadi figur yang kerap menjadi sorotan publik dalam keterlibatannya di dunia politik. Ulama yang selama ini lebih dikenal sebagai penerus budaya keislaman tampaknya sudah mulai terkikis oleh arus politik yang sudah kian jauh dari ajaran-ajaran agama. Baik dalam interpretasi, maupun dalam hal kebijakan yang tidak lagi memihak pada masyarakat.¹²

Masyarakat, sebagai *mad'u* (mitra dakwah) terdiri dari beberapa macam golongan manusia, oleh karena itu, menggolongkan *mad'u* sama dengan menggolongkan manusia itu sendiri, profesi, ekonomi, dan seterusnya. Pengolongan *mad'u* antara lain sebagai berikut: dari segi sosiologis, masyarakat pedesaan, perkotaan, kota kecil, serta masyarakat di daerah marginal di kota besar, dari struktur kelembagaan, ada masyarakat golongan priyayi, abangan, dan santri,

¹¹Duski Samad, *Fiqh Politik Ulama dalam Pemilihan*, <http://padang.ekspres.co.id/?news=nberita&id=3224>, di akses 09 april 2013.

¹²Abdurrahman, "Fenomena Kiai..", h. 9.

dari segi tingkatan usia, golongan anak-anak, remaja, dan orang tua, dari segi profesi, golongan petani, pedagang seniman, buruh, pegawai negeri, dari segi tingkatan ekonomis, ada golongan kaya, menengah dan miskin.¹³

Penggolongan masyarakat di atas didasarkan bahwa seorang ulama dapat memberikan teladan kepada siapa saja, baik pejabat, maupun masyarakat biasa, tanpa harus memilah dan memilih dalam berdakwah, selain itu wadah ulama dalam berdakwah bisa dimana saja.

Salah satu tempat berkumpulnya orang Islam ialah majelis taklim. Majelis taklim sendiri sebagai tempat ulama menyampaikan tausiyah, ceramah agama dalam rangka pembentukan akhlak, pengetahuan kepada masyarakat, yang materinya berasal dari al Quran dan al hadist.

Ulama harus mampu mencontohkan kepada umat bahwa politik itu harus dapat dijalankan sesuai petunjuk Allah, politik harusnya dikonstruksikan untuk kepentingan lebih luas. Bahkan, ada yang mengatakan politik akan menjadi ibadah bila niat, cara dan tujuannya untuk kemaslahatan umat. Tetapi sebaliknya, politik akan mendatangkan bencana bila didasarkan pada keserakahan untuk berkuasa dengan menjadikan ayat-ayat Allah sebagai legitimasi politik belaka.¹⁴

¹³H.M Arifin, *Psikologi Dakwah*, Jakarta: Bulan bintang, 1997, h. 13-14.

¹⁴Duski Samad, *Fiqih Politik Ulama dalam Pemilihan*, tersip di <http://padangekspres.co.id/?news=nberita&id=3224>, di akses 09 april 2013.

Salah satu bentuk politik ialah pemilu, pada tahun 2004 telah dilaksanakan pemilu yang secara langsung untuk memilih wakil-wakil rakyat serta presiden dan wakilnya. Juga dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah atau sering disebut pilkada langsung. Di berbagai daerah. Pilkada ini merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat.

Pemberlakuan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah Daerah berimplikasi pada pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.¹⁵ Artinya, proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang selama ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah mengalami perombakan. Karena itu siapa yang akan menjadi gubernur dan bupati/walikota akan ditentukan sendiri oleh rakyatnya di daerahnya.

Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut Pilkada adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pilkada meliputi :

- a. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.¹⁶

¹⁵Hafied Cangara, *Komunikasi Politik...*,h. 210.

¹⁶Tim Komisi Pemilihan Umum, *Buku Panduan Kpps Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*, Cet I, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum dan Australian Electoral Commission, 2010, h. 2.

Salah satu bentuk pilkada, ialah pilkada kota Palangkaraya yang dilaksanakan tanggal 5 juni 2013 yakni, pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya.

Dari uraian latar belakang masalah maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul:

PERSEPSI JAMAAH MAJELIS TAKLIM DI KECAMATAN JEKAN RAYA TERHADAP PARTISIPASI POLITIK ULAMA DALAM PILKADA TAHUN 2013 KOTA PALANGKA RAYA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis meneliti masalah tersebut dengan rumusan masalah sebagai berikut:
Bagaimana Persepsi Jamaah Majelis Taklim di Kecamatan Jekan Raya terhadap Partisipasi Politik Ulama dalam Pilkada tahun 2013 Kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Persepsi Jamaah Majelis Taklim di Kecamatan Jekan Raya terhadap Partisipasi Politik Ulama dalam Pilkada Tahun 2013 Kota Palangka Raya.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi atau manfaat penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis:

1. Untuk memberikan gambaran tentang kiprah ulama dalam dunia politik dan dakwah di Kota Palangkaraya;
2. Untuk mengembangkan pengetahuan penulis yang berkenaan dengan peran ulama dalam al Quran dan al hadist;
3. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa jurusan dakwah tentang partisipasi ulama dalam politik.
4. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur dakwah bagi perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya.

b. Secara Praktis:

1. Dapat dijadikan landasan bagi partai-partai politik, ormas-ormas Islam, agar lebih mementingkan kepentingan umat, dan jangan menjual nama ulama demi kepentingan politik.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN; yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

- BAB II** KAJIAN PUSTAKA; yang berisikan tentang penelitian sebelumnya, deskripsi teoritik yang meliputi; Definisi Persepsi, Pengertian Jamaah dan ruang lingkup Majelis Taklim, Ruang lingkup Ulama, Ruang lingkup Pilkada Pengertian Politik dan ruang lingkup politik, Peran ulama dalam membangun nilai-nilai demokrasi, Pandangan Islam Terhadap Ulama Yang Berpolitik, Dan Kerangka Pikir Penelitian.
- BAB III** METODOLOGI PENELITIAN; yang berisikan tentang waktu dan tempat, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, Definisi operasional dan Kopseptual penentuan latar penelitian data dan sumber dan jenis data, Populasi dan sampel, metode pengujian instrumen, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
- BAB IV** HASIL PENELITIAN, berupa profil lokasi, penelitian letak geografis penelitian, dan hasil persepsi jamaah majelis taklim di kecamatan Jekan Raya terhadap partisipasi politik ulama dalam Pilkada.
- BAB V** PENUTUP, Simpulan, dan Saran.
- LAMPIRAN** FOTO-FOTO DOKUMENTASI,